

Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Serin Priono¹, Zaili Rusli²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: serinpriono19@gmail.com

Abstrak

Wisata Kampung Bandar merupakan salah satu wisata yang memiliki banyak cerita sejarah dan budaya tentang cikal bakal berdirinya Kota Pekanbaru saat ini. Dalam proses pengembangan wisata Kampung Bandar untuk menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Pekanbaru, tidak terlepas dari permasalahan dalam menyatukan kepentingan-kepentingan antar pihak yang terlibat dalam proses tersebut yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Kelompok Sadar Wisata Kampung Bandar, dan Pihak Swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan wisata Kampung Bandar berbasis *collaborative governance* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan kendala-kendala yang ada dalam proses pengembangannya. Teori yang digunakan yaitu teori proses *collaborative governance* oleh Ansell and Gash dengan 5 indikator proses: *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengembangan wisata Kampung Bandar berbasis *collaborative governance* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu belum berjalan dengan efektif komunikasi antar pihak, kurangnya peran sumber daya manusia dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan tidak adanya MoU dalam proses kerjasama.

Kata kunci: Pengembangan Wisata, *Collaborative Governance*, Kampung Bandar

Abstract

Kampung Bandar Tourism is one of the tours that has many historical and cultural stories about the forerunner to the founding of Pekanbaru City today. In the process of developing Kampung Bandar tourism to become one of the leading destinations in Pekanbaru City, it is inseparable from the problem of bringing together the interests of the parties involved in the process, namely the Pekanbaru City Culture and Tourism Office, Kampung Bandar Tourism Awareness Group, and the private sector. This study aims to analyze the development of Kampung Bandar tourism based on collaborative governance by the Pekanbaru City Culture and Tourism Office and the constraints that exist in the development process. The theory used is collaborative governance process theory by Ansell and Gash with 5 process indicators: *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes*. This research uses a type of descriptive qualitative research. The results of this study found that the development of Kampung Bandar tourism based on collaborative governance by the Pekanbaru City Culture and Tourism Office had not run optimally because there were several influencing factors, including not yet effective communication between parties, the lack of the role of human resources from the Culture Office and Pekanbaru City Tourism and the absence of an MoU in the collaboration process.

Keywords: Tourism Development, Collaborative Governance, Village Villages

PENDAHULUAN

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan; Pembangunan Berkesinambungan; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi kontribusi besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau terus menggali potensi sektor pariwisata untuk memberikan pengaruh positif dalam mendukung perkembangan daerah. Pengembangan potensi destinasi wisata ini dilakukan sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi saat dua sektor unggulan Riau mengalami fluktuatif. Seperti migas dan perkebunan yang selama ini berperan besar dalam mendongkrak perekonomian daerah. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Meskipun kondisi alam di Riau terbatas dan berbeda dengan daerah lainnya, tapi Riau memiliki cukup banyak daya tarik wisata. Selain itu event tahunan yang diselenggarakan setiap kabupaten yang ada di Riau juga merupakan industri pariwisata yang cukup berpotensi.

Pembangunan kepariwisataan di Kota Pekanbaru adalah pembangunan Pariwisata yang berbasis sejarah dan budaya. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan juga merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan mencakup dalam bidang sosial dan budaya serta kehidupan beragam yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta upaya dalam melestarikannya.

Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata perkotaan seperti Kota Pekanbaru. Pekanbaru dengan wisata belanjanya, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), dan wisata berbasis pendidikan (knowledge-based tourism). Pengembangan aktivitas wisata di Kota Pekanbaru mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara cepat dan tersebar tidak merata di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 bahwa di Kota Pekanbaru terdapat kawasan wisata strategis yang merupakan Top 3 (Three) Destinasi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti :

Tabel 1 Top 3 (Three) Destinasi Berpotensi Untuk Dikembangkan Di Kota Pekanbaru

No.	Nama Kawasan Wisata	Lokasi	Jumlah Kunjungan Periode 2019-2022
1	Kawasan Wisata Heritage Kampung Bandar	Kel. Kampung Bandar Kec. Senapelan Kota Pekanbaru	10.945

2	Kawasan Wisata Danau Bandar Khayangan	Kel. Sungai Ambang Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	31.169
3	Kawasan Wisata Okura	Kel. Tebing Tinggi Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	12.856

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, ketiga kawasan tersebut merupakan kawasan yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata Pekanbaru saat ini, dengan adanya potensi budaya bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan agar Kota Pekanbaru memiliki pariwisata yang unggul berbasis budaya melayu. Namun dapat dilihat pada Tabel 1.2 tersebut bahwasanya dari 3 (Tiga) kawasan yang menjadi Top Three (3) destinasi Kota Pekanbaru, kawasan Heritage Kampung Bandar memiliki jumlah kunjungan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan kawasan wisata pembandingnya yaitu kawasan wisata Okura dan kawasan wisata Danau Bandar Khayangan.

Kawasan Heritage Kampung Bandar merupakan kawasan kota tua di Pekanbaru yang merupakan cikal bakal dari Kota Pekanbaru saat ini. Berdasarkan Tata Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2006, bahwa Kawasan Pasar Bawah telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Luas wilayah Kelurahan Kampung Bandar ialah 35,62 Ha terdiri dari 8 (delapan) RW, 29 (dua puluh sembilan) RT, dengan sempadan sebelah utara ialah Sungai Siak, sebelah selatan ialah Kelurahan Padang Terubuk, sebelah timur ialah Kelurahan Kampung Baru, dan sebelah barat ialah Kelurahan Kampung Dalam.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru No. 84 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 303 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Kota Pekanbaru bahwa kawasan Kampung Bandar telah ditetapkan sebagai kawasan Wisata, dikarenakan Kampung Bandar memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal. Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha dalam mengembangkan dan memajukan objek wisata agar setiap objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya agar dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya (Barreto dan Giantari, 2015). Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah merupakan alasan utama dalam pengembangan pariwisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak.

Untuk mengembangkan wisata yang ada di Kampung Bandar tidak terlepas dari proses perbaikan pada yang memungkinkan diperbaiki dan tidak perlu banyak menunggu sampai persyaratan yang akan dilakukan terpenuhi. Dalam hal ini akan dijelaskan pada tabel berikut mengenai kondisi proses pengembangan wisata Kampung Bandar

Tabel 1 Proses Pengembangan Kampung Bandar

No.	Sebelum Pengembangan (Tahun 2011-2015)	Setelah Pengembangan (Tahun 2016-2022)
1.	Keadaan bangunan bersejarah terbengkalai	Keadaan bangunan bersejarah sudah di perbaiki dan didaftarkan ke dalam situs cagar budaya
2.	Keadaan kawasan masih kumuh	Keadaan kawasan sudah mulai bersih
3.	Keadaan bangunan yang belum tertata	Keadaan bangunan dan kawasan sudah di revitalisasi

4.	Tradisi melayu yang sudah mulai hilang	Tradisi melayu sudah mulai dibangkitkan
5.	Belum adanya Kelompok Sadar Wisata	Sudah dibentuk Kelompok Sadar Wisata Kampung Bandar
6.	Masih mengandalkan wisata sejarah dan budaya	Sudah ada wisata buatan seperti café dan restoran dengan sensasi makan di atas kapal yang mengapung di sungai, dan pembuatan taman-taman untuk bersantai dan bermain anak-anak, serta gerai UMKM yang menjual makanan dan souvenir khas melayu

Sumber : *Olahan Peneliti,2023*

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dipaparkan beberapa perkembangan yang telah dilakukan di kawasan Kampung Bandar mulai dari revitalisasi bangunan bersejarah serta penataan bangunan-bangunan disekitar kawasan Kampung Bandar dan membangkitkan kembali tradisi yang sempat ditinggalkan sampai dengan pembuatan tempat wisata baru agar menunjang kegiatan wisata di Kampung Bandar.

Dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak tersebut wisata Kampung Bandar masuk dalam nominasi 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2022. Akan tetapi dalam proses kolaborasi tersebut berdasarkan observasi peneliti belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya keterlibatan keseluruhan komponen masyarakat, pemerintah serta pihak swasta dan kurang efektifnya komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di Kampung Bandar. Kemudian adanya beberapa konflik kepentingan pribadi dalam pelaksanaan proses kolaborasi yang membuat wisata Kampung Bandar pada tahun 2023 ini tidak masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa Kampung Bandar memiliki cukup banyak objek wisata yang dapat dikunjungi dan berpotensi untuk dikembangkan serta memiliki peluang besar untuk kemajuan pariwisata berkelanjutan di Kota Pekanbaru, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan objek-objek wisata yang ada serta belum optimal program pendukung dari pemerintah dalam memajukan dan mengembangkan Kampung Bandar guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait "Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru"

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penelitian ini akan memberikan gambaran tentang masalah penelitian dan pemecahannya. Penelitian kualitatif ini digunakan dalam meneliti secara alamiah dari objek penelitian. Peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dari penelitian ini. Peneliti memilih teknik triangulasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi terdiri dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data kualitatif yang paling banyak diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah (Sugiyono,2017). Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data terkait bagaimana pengembangan wisata di Kampung Bandar, kemudian hasilnya digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana Pengembangan Wisata Kampung Bandar berbasis collaborative governance oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Dimana dalam proses *collaborative governance* Ansell dan Gash diukur menggunakan 5 indikator, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut :

Face to face dialog (dialog tatap muka)

Dalam proses kolaborasi, dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang penting yang menggunakan pesan untuk mencapai makna yang sama antara dua orang atau lebih dalam situasi di mana pembicara dan pendengar memiliki kesempatan yang sama. Dialog tatap muka terjadi saat adanya sifat saling melengkapi antar pihak yang terkait. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses.

Dalam hasil penelitian ini face to face dialog (pertemuan tatap muka) sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal. Karena kerjasama dengan pihak yang saling terlibat tidak memiliki jadwal yang tetap melainkan berdasarkan kondisional saja. Masing-masing pihak melakukan pertemuan secara langsung dan membahas tentang permasalahan yang ada. Komunikasi yang dibangun antara para aktor dalam musyawarah secara langsung, akan tetapi belum semua pihak menghadiri forum musyawarah.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Kepercayaan diri seseorang didasarkan pada kebutuhan orang lain dan bukan pada kemampuan mereka sendiri. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011), dalam ukuran keberhasilan collaborative governance salah satunya yaitu adanya rasa saling percaya antar aktor, yang dilandasi oleh hubungan profesional atau sosial dengan keyakinan bahwa aktor mempercayakan informasi atau upaya aktor lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa percaya terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

Dalam penelitian ini bahwa membangun kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak. Oleh karena itu dari pihak dinas sebagai pengambil kebijakan arah tujuan meyakinkan masyarakat, pemerintah Kampung Bandar dan swasta sedangkan dan Pokdarwis yang membantu mengelola sekaligus penggerak dari arahan Pemerintah untuk menjaga dan merawat objek wisata. Masyarakat yang telah membuat komunitas atau kelompok yang tujuannya sebagai jembatan dan membantu pemerintah dan pokdarwis menjaga rasa aman dan tenang, serta menyadarkan pihak lainnya untuk membantu proses kegiatan serta program yang saling meyakini satu sama lain untuk mengembangkan wisata Kampung Bandar.

Commitment to Process (Komitmen dalam Proses)

Komitmen adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu prosedur dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melakukan kegiatan kolaborasi, harus ada kesadaran dari masing-masing pemangku kepentingan untuk tugas-tugas tertentu. Setiap mitra mengetahui tentang usaha yang menjadi bagiannya dan merupakan bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Pemangku kepentingan diharuskan untuk terus berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan di masa depan.

Pandangan Ansel dan Gash dalam Rahmawati (2016), bahwa tingkat komitmen pemangku kepentingan dalam kolaborasi adalah variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan collaborative governance. Commitment to process dapat dicapai melalui saling mengakui ketergantungan (mutual recognition of interdependence), kepemilikan terhadap proses (shared ownership of process), dan keuntungan yang didapat melalui proses kolaborasi (openness to exploring mutual gain). Dalam penelitian ini bahwasanya dari setiap pihak sudah saling memahami terkait komitmen terhadap setiap proses kerjasama dalam mengembangkan wisata di Kampung Bandar.

Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Pandangan Ansel dan Gash dalam Rahmawati (2016), bahwa di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus menumbuhkan pemahaman khas tentang apa pada

umumnya dapat mereka capai bersama. Kesepakatan tentang definisi masalah atau pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah contoh lain dari pemahaman bersama. Proses pembelajaran dapat mencakup pengembangan pemahaman bersama. Misi yang jelas, definisi masalah bersama, dan identifikasi nilai-nilai bersama adalah semua cara untuk berbagi pemahaman.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya memberi pemahaman bersama dalam pengembangan wisata Kampung Bandar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memahami bahwa pengembangan perlu untuk dilakukan karena sesuai misi untuk membangun kawasan wisata yang nantinya membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya mengingat bahwa Pemerintah Kampung merupakan inisiator dari pengembangan Kampung Bandar, maka dalam hal itu akan diperjuangkan pencapaian kesepakatan bersama dalam pengembangan tersebut. Sepemahaman ini terbentuk untuk lingkungan setempat dan akan berlanjut terus dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan juga swasta.

Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Studi kasus menunjukkan bahwa ketika tujuan dan manfaat kolaborasi relatif jelas dan ketika kolaborasi cenderung berhasil, kolaborasi akan terjadi. Dalam proses ini, hasil sementara dimaksud sebagai hasil proses yang signifikan untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses, terlepas dari kenyataan bahwa hasil antara dapat mewakili keluaran yang sebenarnya. Siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik dapat dipupuk sebagai hasil dari keberhasilan ini yang memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif.

Dalam penelitian ini, hasil sementara dari kolaborasi antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru bersama masyarakat dan pihak lainnya bahwa pada tahun 2022 Kampung Bandar berhasil masuk dalam 300 besar anugerah wisata tingkat nasional, dan mendapatkan apresiasi unggulan 1 untuk kategori toilet dan unggulan 2 untuk kategori CHSE

Kendala dalam Pengembangan Wisata Kampung Bandar Berbasis Collaborative Governance Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

1. Komunikasi dalam Musyawarah Tidak Efektif

Komunikasi berjalan dengan efektif apabila semua pihak yang terlibat dapat hadir dan kebersamai setiap diskusi yang akan dilakukan. Namun kenyataannya saat peneliti melakukan sesi wawancara dengan informan bahwa pada saat pertemuan untuk diskusi terkait pengembangan Kampung Bandar masih ada beberapa yang tidak dapat kebersamai. Hal lain ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian waktu atau jadwal untuk melakukan proses komunikasi dalam pertemuan yang akan dilakukan, oleh karena itu komunikasi dalam musyawarah tidak efektif sehingga menjadi kendala dalam proses pengembangan yang berbasis *collaborative governance* yang akan dilakukan.

2. Kurangnya Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terkait Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mempunyai peran penting sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan bantuan pihak lain seperti pemerintahan di sekitar lokasi wisata, masyarakat di sekitar dalam Kelompok Sadar Wisata, dan pihak swasta yang terlibat.

3. Tidak adanya MoU (*Memorandum of Understanding*)

MoU atau Memorandum of Understanding adalah suatu perjanjian kesepakatan tertulis antar kedua belah pihak untuk melakukan suatu kerjasama bisnis, dalam hal ini peneliti tidak menemukan bahwasanya pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki MoU dengan pihak stakeholder seperti Sekolah Tinggi Pariwisata Riau atau dengan pihak Bank Indonesia, PT Pertamina Hulu Rokan.

SIMPULAN

Pengembangan wisata Kampung Bandar yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah memberikan dampak yang cukup baik untuk kemajuan wisata Kampung Bandar. Dalam mengembangkan wisata Kampung Bandar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru berkolaborasi dengan beberapa pemangku seperti Pemerintahan Kampung Bandar, Kelompok Sadar Wisata Kampung Bandar, Masyarakat Kampung Bandar serta pihak lainnya seperti Bank Indonesia, Pertamina Hulu Rokan bersama Sekolah Tinggi Pariwisata. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam proses pengembangan wisata Kampung Bandar yang dilakukan melalui kolaborasi. Kendala pertama yaitu terkait proses komunikasi antar pihak yang kurang berjalan efektif. Kendala kedua yaitu kurangnya peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terkait Sumber Daya Manusia. Kendala ketiga yaitu terkait tidak adanya kebijakan tertulis atau MoU yang berguna untuk memahami tanggungjawab serta tugas masing-masing dimana hal tersebut dapat memberi pengaruh untuk keberlanjutan pengembangan wisata Kampung Bandar untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019, November). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). In Conference on Public Administration and Society (Vol. 1, No. 01).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Agus, Dwiyanto. (2011). *Manajemen Pelayanan Public*. Yogyakarta: Gadjadara University Press
- Anindita, M., & GUNANTO, E. Y. A. (2015). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kunjungan ke kolam renang Boja (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Arjana, Prof. Dr. I Gusti Bagus. (2019). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Barreto, M., Gintari, I. G. A. (2015). "Strategi Pengembangan Objek Wisata Air Panas Di Desa Marobo, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste". *E-jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 4(11): 779.
- Damanik, Janianton. (2013). *Pariwisata Indonesia (Antara Peluang Dan Tantangan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, *An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment*, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration : Theory, Techniques and Challengers*, Hlm. 15-32, Heidelberg: Springer International Publishing
- Happy Marpaung. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta
- Iskandar Wiryokusumo. (2011). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Media.